

**KAJIAN YURIDIS HAK WARGA NEGARA DALAM MENDAPAT
BANTUAN KONSULER MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi
tentang Putusan Mahkamah Internasional (India v. Pakistan) 2019)**

**Oleh:
Muhammad Elga Zhari
E1A021089**

ABSTRAK

Akses untuk bantuan konsuler wajib diberikan oleh negara penerima apabila terdapat warga negara dari negara pengirim yang membutuhkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Pelanggaran akses bantuan konsuler terdapat dalam kasus Kulbhushan Sudhir Jadhav, seorang warga negara India yang dijatuhi pidana mati oleh Pakistan pada 2017. Jadhav tidak diberitahu atas haknya untuk mendapatkan bantuan konsuler. India yang merasa dirugikan, mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Internasional pada 2017.

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui pengaturan hak warga negara asing dalam mendapat bantuan konsuler menurut hukum internasional serta menganalisis penyelesaian pelanggaran hak warga negara asing dalam mendapat bantuan konsuler dalam kasus pidana mati yang diterapkan oleh Pakistan kepada Jadhav berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dalam bentuk teks naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak warga negara asing dalam mendapat bantuan konsuler telah diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Negara pihak dari Konvensi dapat melakukan perjanjian internasional untuk menambah atau menegaskan ketentuan pada Konvensi Wina 1963. Mahkamah Internasional pada kasus ini, menyatakan Pakistan bersalah karena telah melanggar Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, dan c Konvensi Wina 1963. Mahkamah Internasional memutuskan Pakistan bersalah karena mengabaikan permohonan akses bantuan konsuler oleh India untuk Jadhav.

Kata kunci: bantuan konsuler; hak warga negara; perwakilan konsuler.

**LEGAL REVIEW OF INDIVIDUALS RIGHTS TO RECEIVE CONSULAR AID
UNDER INTERNATIONAL LAW (Study of International Court Justice's
Judgement (India v. Pakistan) 2019)**

**By:
Muhammad Elga Zhari
E1A021089**

ABSTRACT

Access to consular aid must be provided by the receiving state if there are citizens of the sending state who need it, as regulated in Article 36 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. Breach of access to consular aid occurred in the case of Kulbhushan Sudhir Jadhav, an Indian citizen who was sentenced to death by Pakistan in 2017. Jadhav was never informed of his rights to receive consular aid. India, which felt aggrieved, submitted this issue to the International Court of Justice in 2017.

The aim of this research is to find out the regulations of the rights of foreign citizens to receive consular aid according to international law and to analyze the resolution of violations of the rights of foreign citizens to receive consular aid in the death penalty case applied by Pakistan to Jadhav based on international law. This is a normative legal research with statutory approach and case approach, method and secondary data for data resources. The data source used is secondary data with literature study data collection methods then processed and analyzed using qualitative normative methods in the form of narrative text.

Result of this research show that the regulation of the rights of foreign citizens to receive consular aid has been regulated through Article 36 of the 1963 Vienna Convention. States parties of the Convention can also conclude themselves into bilateral or regional agreements between countries to supplementing or confirming the provisions of the 1963 Vienna Convention. International Court of Justice in this case, stated that Pakistan was guilty of breaching Article 36 paragraph (1) letters a, b, and c of the 1963 Vienna Convention. International Court of Justice found Pakistan guilty of ignoring India's request for access to consular aid for Jadhav.

Keywords: citizen's rights; consular aid; consular representative.